

PENGARUH INSENTIF PAJAK PKB DAN BBNKB TERHADAP PAD JAWA TIMUR DI MASA PANDEMI COVID-19

¹Siti Hafshoh Pinky Arifah Riyanto, ²Lidia Andiani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkececwara

Abstract

This study aims to analyze how the effect of incentives for Motor Vehicle Taxes (PKB) and Motor Vehicle Title Fee (BBNKB) on Local Own Revenue (PAD). This research was conducted during the Covid 19 Pandemic Period in the Regional Revenue Agency of East Java Province with a comparison of 2019 and 2020. The research uses a qualitative descriptive approach with the type of case study research. The data analysis technique in this study used the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that the incentive provision was carried out once in 2019, which shows that incentives can increase PKB and BBNKB revenues and can exceed the PAD target. Whereas in 2020 the incentives were given three times and showed that the incentives provided an increase in PKB and BBNKB revenues and could exceed the PAD target during the Covid-19 Pandemic.

Keywords: Tax Incentive, Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Title Fee (BBNKB), Local Own Revenue (PAD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Masa Pandemi Covid 19 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan perbandingan Tahun 2019 dan 2020. penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif dilakukan satu kali pada tahun 2019 yang menunjukkan pemberian insentif mampu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD. Sedangkan pada tahun 2020 pemberian insentif diberikan sebanyak tiga kali dan menunjukkan bahwa pemberian insentif memberikan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD di masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Insentif Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendahuluan

Sejak awal Januari 2020 masyarakat Indonesia dihadapkan oleh virus Covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi dalam sistem kerja pendapatan daerah, juga dampak kesehatan perekonomian negara yang menjadi tolak ukur suatu daerah dapat berkembang. Dampak yang dapat dirasakan ketika ada wabah adalah menurunnya tingkat perekonomian baik sektor swasta maupun sektor perekonomian. Sehingga sebagian warga menunda untuk membayarkan pajak karena pendapatan yang semakin menurun dan kebutuhan yang semakin mendesak.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan wajib pajak dalam membayar pajak, guna untuk membantu keberlangsungan pemulihan pembangunan daerah. Salah satu cara yaitu dengan diberikan kebijakan insentif pajak kepada wajib pajak. Pemberian insentif ini ditujukan untuk meringankan masyarakat dalam membayar pajak karena situasi perekonomian yang tidak stabil sehingga insentif yang diberikan dapat menarik minat wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tersebut. Selain itu pemerintah juga memiliki tujuan agar penerimaan pendapatan dari sektor pajak meningkat walaupun kebijakan insentif ini diberlakukan.

Terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur selama tahun 2020 untuk menarik minat wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Kebijakan pertama pada tanggal 3 April 2020 – 31

¹Email Address : lidia@stie-mce.ac.id

Received 18 Juli 2021, Available Online 1 Desember 2021

Agustus 2020 Gubernur memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan yang kedua pada tanggal 12 juni 2020 – 31 Agustus 2020 Gubernur memberikan pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Roda Dua dan Tiga sebesar 15% (lima belas persen) dan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor Roda empat atau lebih dan alat berat sebesar 5% (lima persen). Selain itu gubernur mengeluarkan kebijakan membebaskan denda pajak dan denda bea balik nama kendaraan bermotor bagi semua kendaraan bermotor. Kebijakan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan minat wajib pajak kendaraan bermotor untuk segera membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor karena berdasarkan data perolehan bulan januari sampai dengan mei 2020 masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak. Terhitung sejak 31 Mei 2020 Terdapat 1.315.009 obyek kendaraan bermotor dengan potensi Rp. 559.363.782.600,00. Dengan perincian Roda Dua sebanyak 1.142.092 obyek dengan potensi Rp. 215.494.808.000 sedangkan Roda Empat sebanyak 173.007 obyek dengan potensi sebesar Rp. 343.868.974.600. (JATIM, 2020) .

Kebijakan yang terakhir yang berlaku pada tanggal 1 September 2020-28 November 2020 Gubernur mengeluarkan kebijakan pemutihan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemutihan juga berlaku dalam bentuk pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai salah satu terobosan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari segi kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid 19. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa apakah pemberian insentif/stimulan pajak kendaraan bermotor dan pemberian insentif/stimulan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi jawa timur di masa pandemi covid 19.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari daerah dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku (Halim dan Nasir, 2006)

Pajak

Pajak adalah iuran yang diperoleh dari masyarakat yang ditujukan kepada Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun namun memiliki tujuan untuk kepentingan bersama (Mardiasmo, 2016). Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 adalah pungutan yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 adalah pajak latas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan yang mana kebijakan tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib

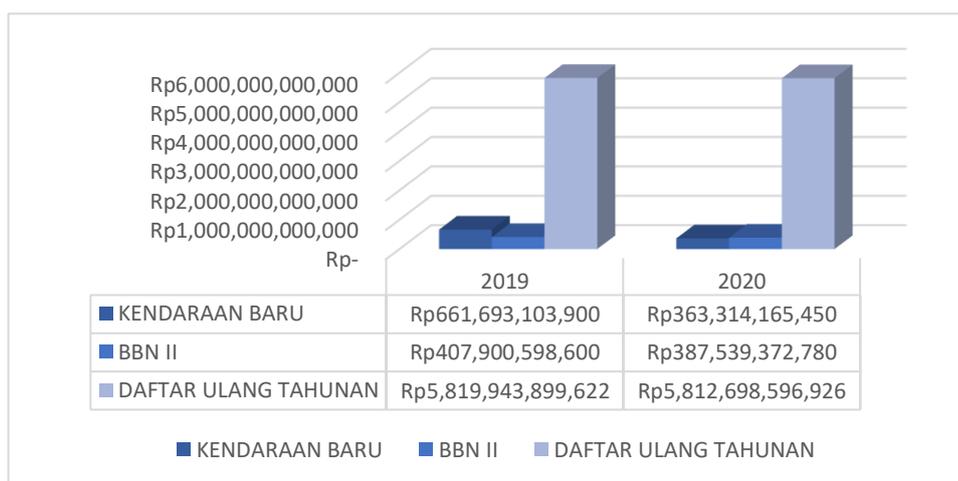
pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang serta pada masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah data PKB , BBNKB dan PAD sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak Tahun 2019 dan 2020. Hasil wawancara yang diperoleh adalah bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target penerimaan PAD yang sudah ditetapkan oleh Gubernur di masa pandemi covid 19. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data model Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Pemberian Insentif/Stimulan PKB Terhadap Penerimaan PAD di Masa Pandemi Covid-19.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Penerimaan PKB Tahun 2019 dan 2020

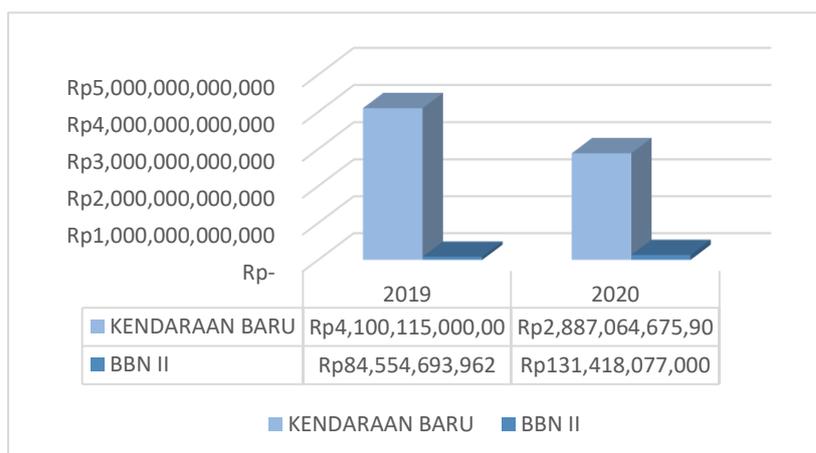
Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2020 pada Kendaraan Baru, BBN II dan Daftar Ulang Tahunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini di pengaruhi oleh adanya instruksi menurunkan atau *refocusing* anggaran untuk pemenuhan target di tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Data per 4 Januari 2021 menunjukkan Total penerimaan PAD sampai dengan Desember 2020 Penerimaan dari sektor PKB sudah melebihi target dengan total penerimaan PKB berjumlah Rp. 6.566.17.985.216,- dan Target yang di tetapkan berjumlah Rp. 5.600.000.000.000,- dengan presentase 117,25%.

Pengaruh Pemberian Insentif/Stimulan BBNKB Terhadap Penerimaan PAD di Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan bahwa penerimaan BBNKB mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2020 pada Kendaraan Baru dibandingkan dengan tahun 2019 sedangkan BBN II mengalami peningkatan di tahun 2020. Penurunan BBNKB tahun 2020 di pengaruhi oleh adanya instruksi menurunkan atau *refocusing* anggaran untuk pemenuhan target di tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Sedangkan untuk peningkatan BBN II terjadi karena ada program pemberian insentif yang diberikan pada tahun 2020. Data per 4 Januari

2021 menunjukkan Total penerimaan PAD sampai dengan Desember 2020 Penerimaan dari sektor BBNKB sudah melebihi target dengan total penerimaan BBNKB berjumlah Rp. 3.022.188.308.400,- dan Target yang di tetapkan berjumlah Rp. 2.550.000.000.000,- dengan presentase 118,52%.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Penerimaan BBNKB Tahun 2019 dan 2020

Sumber : Data diolah, 2021.

Pembahasan

Pengaruh pemberian insentif/stimulan PKB terhadap penerimaan PAD di masa pandemi covid 19

Pada tahun 2019 merupakan tahun yang stabil sehingga insentif cukup diberikan satu kali pada tahun tersebut. Fungsi dari pemberian insentif pada tahun 2019 berfungsi agar Target yang telah di tentukan dapat tercapai karena penerimaan masih di rasa kurang Sehingga dengan adanya pemberian insentif penerimaan cenderung meningkat dari bulan-bulan sebelumnya dan penerimaan PAD pun melampaui target yang sudah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2020 pemberian insentif diberikan 3 kali untuk menstabilkan keadaan ekonomi di Jawa Timur. Faktor yang menyebabkan penerimaan menurun adalah menurunnya penjualan kendaraan baru dan meningkatnya leasing kendaraan bekas. Dengan melihat pada tahun 2019 dan 2020 pemberian insentif memberikan sedikit peningkatan pada penerimaan PKB.

Pada sisi penerimaan PKB jika dihubungkan dengan teori insentif yang ada insentif memberikan peningkatan terhadap perolehan PAD. Hal ini didukung dengan adanya teori oleh Winardi bahwa tujuan dari pemberian insentif berfungsi sebagai perangsang wajib pajak bukan hanya sekedar menghasilkan pendapatan pemerintah melainkan dorongan untuk perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Dengan kepatuhan tersebut dapat di pastikan penerimaan akan meningkat dan tujuan Pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi maka dapat terwujud.

Pengaruh pemberian insentif/stimulan BBNKB terhadap penerimaan PAD di masa pandemi covid 19

Pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi perolehan penerimaan sebelum pemberian insentif mengalami naik turun untuk jenis Kendaraan Baru dan BBN II. Pemberian insentif diberikan pada tanggal 23 September 2019 – 14 September 2019 pada kendaraan baru menunjukkan peningkatan penerimaan setelah diberikan insentif. Faktor yang menyebabkan meningkatnya penerimaan adalah penjualan kendaraan baru yang meningkat pada akhir tahun 2019. Karena ekonomi masih dalam keadaan stabil maka banyak masyarakat Jawa Timur masih tertarik untuk membeli Kendaraan Baru.

Pada tahun 2020 penerimaan BBNKB mengalami penurunan karena informan mengatakan penjualan kendaraan baru mengalami penurunan secara drastis sedangkan penjualan kendaraan bekas mengalami sedikit kenaikan. Di dukung dengan adanya peningkatan BBN II yang menunjukkan kendaraan bekas sedikit mengalami kenaikan penjualan. Di masa pandemi banyak lapisan masyarakat khususnya jawa timur membeli kendaraan bekas sebagai alternatif karena pembelian kendaraan baru dirasa cukup mahal bagi sebagian masyarakat perdesaan maupun perkotaan.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang sudah ditetapkan oleh Gubernur di masa pandemi covid 19

Di masa pandemi covid 19 Pemerintah Jawa timur memang banyak melakukan kebijakan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Diketahui bahwa kondisi masyarakat mengalami penurunan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kasus covid 19 pada masyarakat sehingga pemerintah Jawa Timur melakukan berbagai upaya demi menjaga stabilitas daerah. Berikut upaya pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan penerimaan PAD: (1) Melakukan pemberian kebijakan Insentif Pajak. (2) Memberikan Hadiah Umroh kepada wajib pajak yang taat. (3) Melakukan sosialisasi program kebijakan Insentif. (4) Memberikan kemudahan akses pembayaran untuk masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemberian Insentif/Stimulus PKB memberikan peningkatan terhadap penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur di Masa Pandemi Covid 19. Dalam penerimaan PKB mengalami naik turun namun mampu memberikan penerimaan terbesar terhadap penerimaan PAD. Penerimaan PKB dapat meningkat karena terdapat tiga kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain dan mampu melebihi Target APBD yang ditentukan. (2) Pemberian Insentif/Stimulus BBNKB memberikan peningkatan terhadap penerimaan PAD. Dalam penerimaan BBNKB pemberian insentif yang diberikan tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Karena kebijakan Insentif yang diberikan pada sektor BBNKB saling melengkapi dengan PKB. Namun meskipun penerimaan BBNKB mengalami penurunan dan kenaikan, penerimaan BBNKB mampu melebihi Target APBD yang ditentukan. (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan berbagai upaya optimalisasi untuk mencapai Target APBD sehingga upaya yang dilakukan sudah maksimal di masa pandemi covid 19.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. *Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*.
- Agustina, R. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraanbermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 83–99.
- Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v6i1.14257>
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (ketiga). salemba empat.
- JATIM, B. (2020). *GUBERNUR JAWA TIMUR BERIKAN DISKON PAJAK KENDARAAN*. <https://www.dipendajatim.go.id/?cat=5>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (S. Suryandari (ed.); 3rd ed.). ALFABETA, CV.